

# RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022



Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan  
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosil.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	15
B. Struktur Organisasi.....	16
C. Kajian Atas Indikator Kinerja .....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	35
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
B. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	39
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V PENUTUP .....	53

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2022 Dinas Sosial, Renja Perubahan tahun 2022 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan 2022 yang mengalami perubahan karena satu dan lain hal. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya, 10 Juni 2022  
**Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya**



**SUHARTO, SE**

Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19650516 198603 1 014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD merupakan tahapan dalam perencanaan penganggaran perubahan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rancangan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja Perubahan SKPD mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Penanjakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Selaras dengan mewujudkan SDM yang berdaya secara ekonomi, maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan terhadap PPKS/PMKS tersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai menjadi



prioritas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Keuangan dan Restorasi Sosial

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

- 8) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana **Rp. 9.134.226.780,-** yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar **Rp. 8.941.622.812,-** atau **97,89 %** dan Belanja Modal **Rp. 192.603.968,-** atau **2,11 %**.



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2021**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%+AI6:AI25 AI6:AI33AI6:AI41U6AI6:AI15AI6 :AI49U6AI6:AI15AI6:AI56UAI6: AI66		100%	66,59 %	66,59 %	100%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Administrasi Kpegawai-an Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Kpegawai-an Perangkat Daerah	100%	-	100%	41,70 %	41,70 %	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	270 Stell	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek	18 Orang	-	100%	83,40 %	83,40 %	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	66,57 %	66,57 %	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Komponen	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 item	-	100%	99,84 %	99,84 %	100%		
Penyediaan Barang Cetak-an dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak-an dan Penggandaan	9 item	-	100%	99,81 %	99,81 %	100%		
Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8805 eksemplar	-	100%	100,00 %	100,00 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	665 Kali		100%	99,75 %	99,75 %	100%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan AC dan Kipas Angin	43 Unit	-	100%	0,00%	0,00 %	100%	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	136 unit	-	100%	79,72 %	79,72 %	100%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	9 unit	-	100%	99,85 %	99,85 %	100%		
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	67 Unit	-	100%	99,00 %	99,00 %	100%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit yang terpenuhi	18 Unit	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	27 unit		100%	99,83 %	99,83 %	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	12 unit	-	100%	99,90 %	99,90 %	100%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258 Kali		100%	99,17 %	99,17 %	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik	222 Kali	-	100%	98,63 %	98,63 %	100%	-	-



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Kali	-	100%	99,70 %	99,70 %	100%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	110 unit	-	100%	33,24 %	33,24 %	100%	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	3 Unit	-	100%	99,43 %	99,43 %	100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	42 Unit	-	100%	0,00%	0,00 %	100%	-	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit yang terpelihara	2 unit		100%	0,00%	0,00 %	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	15 Unit	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	12 Bulan	-	100%	100,00 %	100,00 %	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin	48 unit		100%	0,00%	0,00 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen		100%	99,72 %	99,72 %	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	21 Dokumen		100%	99,71 %	99,71 %	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	-	100%	99,73 %	99,73 %	100%	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	13 Dokumen		100%	99,73 %	99,73 %	100%		
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	100%	99,46 %	99,46 %	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	56 Bulan	-	100%	98,83 %	98,83 %	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	-	100%	99,73 %	99,73 %	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	38 Dokumen	-	100%	99,81 %	99,81 %	100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial	100%	-	100%	92,28 %	0,00 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan		100%	92,28 %	92,28 %	100%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	26 orang	-	100%	92,28 %	0,00 %	100%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti/ Lembaga yang diberi bantuan	69 Panti		100%	0,00%	0,00 %	100%		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%		100%		0,00 %	100%		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	100%		100%		0,00 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1000 Orang	-	100%	94,76 %	94,76 %	100%		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan	120 Orang		100%	0,00%	0,00 %	100%		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	240 Alat Bantu	-	100%	0,00%	0,00 %	100%		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100%		100%	95,02 %	95,02 %	100%		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	8 Kegiatan		100%	95,02 %	95,02 %	100%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	100%	-	100%	86,13 %	86,13 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	189.744 Jiwa		100%	86,13 %	86,13 %	100%		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	189.744 Jiwa		100%	79,97 %	79,97 %	100%		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	103 Kegiatan		100%	98,56 %	98,56 %	100%		
'Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	'Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.000 Jiwa							
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	4988 Orang		100%	89,19%	89,19 %	100%		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	812 orang		100%	81,59%	81,59 %	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	812 orang		100%	81,59%	81,59%	100%		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali		100%	95,85%	95,85%	100%		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Taruna Siaga Bencana	1		100%	95,85%	95,85%	100%		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100%		100%	98,16%	98,16%	100%		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang di data	5 Dokumen		100%	98,16%	98,16%	100%		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara	1 Dokumen		100%	98,16%	98,16%	100%		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Makam Pahlawan	4 Dokumen		100%	0,00%	0,00%	100%		



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	472 Lembaga		100%	92,26%	92,26 %	100%		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	472 Lembaga		100%	92,26%	92,26 %	100%		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	472 Lembaga		100%	92,26%	92,26 %	100%		
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Jumlah Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	14 Orang		100%	0,00%	0,00 %	100%		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	14 Orang		100%	0,00%	0,00 %	100%		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang		100%	0,00%	0,00 %	100%		



Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### A. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat, telah memberi kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah termasuk Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian dan pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Sosial.

Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, mempunyai **Tugas** penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai **Fungsi** yang meliputi :

- a. Penyusunan program kegiatan di bidang Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Sosial;
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.



Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

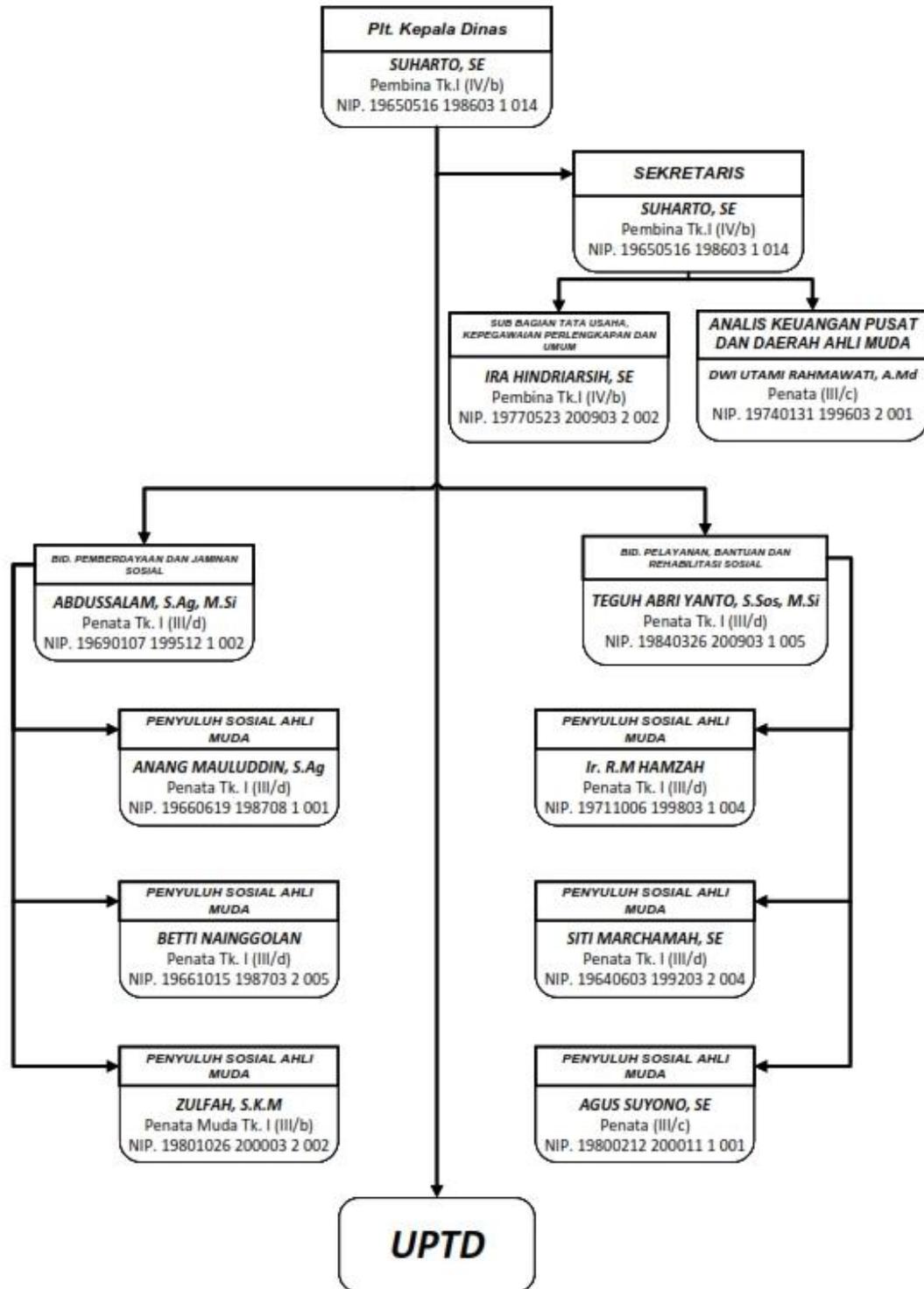
Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



### STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA





### C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kabupaten Kubu Raya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya 2009-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kubu Raya 2014 - 2019, RKPD, dan Draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini :



**Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
01.00	Persentase (%) Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	175%	-	-	100%	70%	-	-	-
02.00	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	50%	47%	-	-	44,90%	23%	-	-	-



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

03.00	Persentase (%) Lanjut Usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanjar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	4%	-	-	100%	100%	-	-	-
04.00	Persentase (%) Gelandangan Pengemis terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	-	30%	-	-	-	100%	-	-	-
05.00	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100%	12419%			100%	89%			-



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

- 1) Perencanaan belum didukung oleh data akurat dan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi lapangan khas Kubu Raya.
- 2) Sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tertampung dalam dokumen perencanaan, ini disebabkan antara lain karena harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap proses perencanaan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
- 3) Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena Bidang-bidang belum menyampaikan laporan tepat waktu.
- 4) Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan.
- 5) Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pembangunan



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

- 2) Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
- 3) Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, percepatan pembangunan terpadu serta penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kecamatan;
- 5) Menjaga konsistensi perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, hingga ke Renja;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun metode dan standarisasi pengukuran perencanaan dan Pembangunan;
- 8) Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Sosial sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 tahun 2019. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 tahun 2019 mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, tata kerja dan pelaporan, pembiayaan, dan kepegawaian. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
- 2) Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Dinas Sosial yang tinggi.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.

- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Dinas Sosial dan sesama pegawai.

Pimpinan Dinas Sosial memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial.

- 5) Tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Dinas Sosial berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi perencanaan.
- 2) Belum tersedianya data yang akurat dalam menunjang perencanaan.
- 3) Belum tersedianya dokumen-dokumen perencanaan untuk pelaksanaan tugas-tugas pembangunan.
- 4) Sarana dan prasarana yang belum mendukung.
- 5) Dengan kondisi ruang kerja yang sempit menyebabkan suasana kerja menjadi kurang nyaman, ditambah belum tersedianya kendaraan operasional untuk menjangkau kecamatan menyebabkan proses monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip Clean government dan Good governance.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.



Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	APBD KAB.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	APBD KAB.		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	90 Stel	Rp 43.610.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	90 Stel	Rp 43.610.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	3 orang	Rp 22.114.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	3 Orang	Rp 22.114.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Komponen	Rp 2.491.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Komponen	Rp 2.491.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Item	Rp 88.911.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 item	Rp 88.911.200



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	3 Item	Rp 22.956.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	3 item	Rp 22.956.000
	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2520 eksemplar	Rp 7.200.000	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2520 eksemplar	Rp 7.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	189 Kali	Rp 193.022.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	189 Kali	Rp 193.022.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan AC dan Kipas Angin	14 Unit	Rp 24.875.940	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan AC dan Kipas Angin	14 Unit	Rp 24.875.940
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	0	Rp -	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	0	Rp -
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	16 Unit	Rp 39.876.870	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	16 Unit	Rp 39.876.870
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit yang terpenuhi	6 Unit	Rp 168.194.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit yang terpenuhi	6 Unit	Rp 168.194.000



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	4 Unit	Rp 49.711.754	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	4 Unit	Rp 49.711.754
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	3 unit	Rp 198.450.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	3 Unit	Rp 198.450.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik	74 Kali	Rp 66.704.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik	74 Kali	Rp 66.704.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Kali	Rp 453.992.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Kali	Rp 453.992.640
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	13 Unit	Rp 9.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	13 Unit	Rp 9.490.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit yang terpelihara	0	Rp -	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit yang terpelihara	0	Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 30.552.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 30.552.600



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	0	Rp -	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	0	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin	16 Unit	Rp 9.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin	16 unit	Rp 9.760.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	Rp 27.215.030	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	Rp 27.215.030
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Rp 14.934.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Rp 14.934.030
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Rp 7.876.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	Rp 7.876.500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	14 Bulan	Rp 2.539.530.590	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	14 Bulan	Rp 2.539.530.590



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Rp 7.443.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	Rp 7.443.140
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	12 Dokumen	Rp 4.299.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	12 Dokumen	Rp 4.299.650
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	2 Orang	Rp 69.997.450	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	2 orang	Rp 69.997.450



Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti/ Lembaga yang diberi bantuan	21 Panti	Rp 33.341.040	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti/ Lembaga yang diberi bantuan	21 Panti	Rp 33.341.040
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	250 Orang	Rp 493.616.550	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	250 Orang	Rp 493.616.550
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	300 Orang	Rp 99.878.830	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	300 Orang	Rp 99.878.830
<b>04.00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendataan Fakir Miskin	263.041 Jiwa	Rp 214.125.950	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendataan Fakir Miskin	62.000 Jiwa	Rp 214.125.950
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penerima Bantuan yang bersumber dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	13 Kegiatan	Rp 602.873.959	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penerima Bantuan yang bersumber dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	30 Kegiatan	Rp 602.873.959
<b>05.00</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Jiwa	Rp 182.278.640	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	Rp 182.278.640
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Taruna Siaga Bencana	52 orang	Rp 48.999.890	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Taruna Siaga Bencana	52 orang	Rp 48.999.890



Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

06.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Dokumen	Rp -	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	0	Rp -
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Makam Pahlawan	0	Rp 24.999.980	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Makam Pahlawan	1 Dokumen	Rp 24.999.980
07.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	166 Lembaga	Rp 2.426.613.300	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	102 Lembaga	Rp 2.426.613.300



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa Stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Sosial sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Sosial didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah Peningkatan kualitas Sosial melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Sosial dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

#### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

#### **INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pembangunan etos kerja.



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

- 5) Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan pemukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutam dengan pembangunan konektivitas laut dan industri maritime, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agrarian.



4. Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan  
Prioritas pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan diarahkan untuk konsolidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hukum, reformasi birokrasi.
5. Pembangunan Ekonomi  
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

B. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah.

Mengacu pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, maka visi Kepala Daerah adalah :

**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan



Penentuan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya harus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Propinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya adalah **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**.

Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan bahwa : **Bahagia**, adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu.

**Bermartabat**, adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

**Terdepan**, adalah kondisi yang menggambarkan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

**Berkualitas**, adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



**Religius**, adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance);
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada NilaiNilai Kearifan Lokal;
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dinas Sosial melaksanakan urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga program dan kegiatan di Dinas Sosial mendukung misi 2 Kabupaten Kubu Raya. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran rencana kerja Dinas Sosial tahun 2021 adalah :



TABEL 3.1  
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA BUDAYA KERJA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERWIBAWA	MENINGKATNYA KEPUASAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	PERESENTASE PENANGANAN PMKS/PPKS	85%
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KEUANGAN	MENINGKATKAN NILAI SAKIP PADA UNIT KERJA	NILAI SAKIP	B

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Pemberdayaan Sosial
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

3.	Program Rehabilitasi Sosial	
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.
	2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti sosial
4.	Program Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
5.	Program Penanganan Bencana	
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
	2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
7.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Binas Mental Spritual

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Dinas Sosial Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada table berikut



**TABEL 3.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2022**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

SKPD/URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Tahun 2023		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>								
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	DINSOS KKR	0	Rp -	APBD KKR	100%	Rp 18,000,000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah	DINSOS KKR	100%	Rp 65,724,000	APBD KKR	100%	Rp 101,777,000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINSOS KKR	100%	Rp 339,456,640	APBD KKR	100%	Rp 346,245,773
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	DINSOS KKR	29 Unit	Rp 456,232,624	APBD KKR	31 Unit	Rp 503,556,660
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINSOS KKR	86 Kali	Rp 520,696,640	APBD KKR	86 Kali	Rp 533,714,056
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DINSOS KKR	30 Unit	Rp 49,802,600	APBD KKR	39 Unit	Rp 114,548,652



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

7	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS KKR	10 Dokumen	Rp 50,025,560	APBD KKR	10 Dokumen	Rp 51,026,071
8	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINSOS KKR	100%	Rp 2,551,273,380	APBD KKR	100%	Rp 2,602,298,848
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>								
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	DINSOS KKR	2 Kegiatan	Rp 103,338,490	APBD KKR	2 Kegiatan	Rp 105,405,260
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>								
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	DINSOS KKR	100%	Rp 493,616,550	APBD KKR	100%	Rp 875,488,881
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINSOS KKR	100%	Rp 99,878,830	APBD KKR	100%	Rp 101,876,407
<b>PROGRAM PENANGANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>								
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	DINSOS KKR	62.000 Jiwa	Rp 816,999,909	APBD KKR	63.240 Jiwa	Rp 833,339,907
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>								



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINSOS KKR	200 Jiwa	Rp 182,278,640	APBD KKR	204 Jiwa	185,924,213
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINSOS KKR	2 Kali	Rp 48,999,890	APBD KKR	2 Kali	Rp 49,979,888
<b>PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>								
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang di data	DINSOS KKR	1 Dokumen	Rp 24,999,980	APBD KKR	1 Dokumen	Rp 25,499,980
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	DINSOS KKR	102 lembaga	Rp 2,426,613,300	APBD KKR	102 lembaga	Rp 2,475,145,566
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>								
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS KKR	0	Rp -	APBD KKR	12 Orang	Rp 15,000,000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1**

**Alokasi Anggaran Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022**  
**Kabupaten Kubu Raya**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Rp 4,399,516,811.00</b>	<b>APBD</b>	
1	06	01	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 50,025,560.00</b>	<b>APBD</b>	
1	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 27,215,030.00	APBD
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 14,934,030.00	APBD
1	06	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7,876,500.00	APBD
1	06	01	2	02		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2,867,277,958.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Rp 2,855,535,168.00	APBD



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7,443,140.00	APBD
1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Rp 4,299,650.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 58,279,329.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 43,610,000.00	APBD
1	06	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 14,669,329.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 339,456,640.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,491,500.00	APBD
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 24,875,940.00	APBD
1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 88,911,200.00	APBD
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 22,956,000.00	APBD



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	06	01	2	06	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7,200,000.00	APBD
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 193,022,000.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 506,537,024.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 168,194,000.00	APBD
1	06	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Rp 39,876,870.00	APBD
1	06	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 100,016,154.00	APBD
1	06	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 198,450,000.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 528,137,700.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 461,433,700.00	APBD
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Rp 66,704,000.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 49,802,600.00</b>	<b>APBD</b>



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30,552,600.00	APBD
1	06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 9,490,000.00	APBD
1	06	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 9,760,000.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Rp 102,485,490.00</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 102,485,490.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 69,997,450.00	APBD
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 32,488,040.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Rp 492,960,480.00</b>	<b>APBD</b>



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 393,081,650.00	APBD
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 393,081,650.00	APBD
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp 99,878,830.00	APBD
1	06	04	2	02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp 99,878,830.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Rp 947,931,018.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 947,931,018.00	APBD



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 214,125,950.00	APBD
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 733,805,068.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Rp 231,278,530.00</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 182,278,640.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Rp 182,278,640.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 48,999,890.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 48,999,890.00	APBD
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Rp 24,999,980.00</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 24,999,980.00</b>	<b>APBD</b>
1	06	07	2	01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 24,999,980.00	APBD
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Rp 2,396,613,300.00</b>	<b>APBD</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp 2,396,613,300.00</b>	<b>APBD</b>



Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 2,396,613,300.00	APBD
---	----	----	---	----	----	---	------------------------	------



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2022. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Dinas Sosial secara khusus maka Renja Dinas Sosial disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, antara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan



## Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 10 Juni 2022  
**Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya**

**SUHARTO, SE**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19650516 198603 1 014